

Papua

PAPUANS ARE DYING SO THAT PEOPLE IN THE EU CAN DRIVE CARS



Demand for biodiesel in the EU is destroying our life in Papua.

In November 2016, the EU published a draft of its biofuel policy for the period from 2021 to 2030. The EU Parliament, the EU Council and the 28 Member States will debate and finalize their biofuel policy over the course of 2017.

In the proposal, the European Commission envisages reducing the share of biofuel from vegetable oils from 7% in 2020 to 3.8% in the year 2030. Since the actual share in fuels currently on the market is 4.9%, the reduction is extremely low. This ongoing demand has grave consequences for the indigenous peoples of Southeast Asia, including indigenous Papuans in the Indonesian provinces of Papua and West Papua, as they will lose their forest and traditional rights to land inherited from their ancestors.

We believe that the EU's biofuel policy has negative effects on the environment, the climate and indigenous land and forest rights. The policy depends on the import of raw materials – in particular palm oil. Millions of hectares of industrial plantations are necessary solely for the production of biofuel. Over the past 10 years, the indigenous Papuans of Indonesia have lost land and forest to oil palm plantation operators that had been granted permits by the Indonesian government. The demand for palm oil has prompted the expansion of plantations on a vast scale in Papua, and as a result indigenous Papuans live in uncertainty as to their inherited land and forest rights.

The negative consequences of the spread of oil palm plantations are numerous: land grabbing, clear-cutting of forests, environmental destruction, human rights violations, and the end of the traditional hunter-gatherer livelihood – indigenous people are reduced to working as day laborers on the plantations, transforming their productive way of life into one of dependent consumers. In short, the expansion of oil palm plantations driven by high market demand is destroying the homeland of indigenous people and plunging them into poverty.

We are aware that demand for palm oil for the production of biofuel in the EU is very high. In 2015 alone, 3.36 million tons of the cheap vegetable oil were used as fuel. Its low price is sure to drive demand further in the coming years. But this also means that the demand for land for oil palms will continue to grow. Furthermore, European multinationals such as Eni Oil, Total Oil and Neste Oil are investing in vast refineries for a new type of biofuel, hydrotreated vegetable oil (HVO). The raw material of HVO is palm oil. Is there enough land in the EU Member States for them to meet their own demand for palm oil? Or will the EU's policy continue to destroy the lives of indigenous people? We therefore consider the EU's policy to be extremely inhumane and misguided with regard to its impact on the environment and the climate, and on indigenous Indonesians, in particular the Papuans.

We, a coalition of civil society organizations and indigenous Papuan communities, therefore call on the European Union to scrap its current biofuel policies. The European Union must abandon the mandatory addition of biofuel to diesel and stop promoting the production of biofuel with billions of euros every year in subsidies, tax breaks and the like. The EU's policy is only beneficial for machines and does not care about the indigenous people who lose their land and forest. While biofuel powers motor vehicles in Europe, indigenous Papuans are dying, deprived of their land and forest.

Manokwari, Papua Barat, Indonesia 28 December 2016



Pietsau Amafnini,

Koordinator JASOIL Tanah Papua di Manokwari, Papua Barat Mobile: +6281344435008

Email: menawi2001@yahoo.com; <http://sancapapua.wordpress.com>;

<http://jasoilpapua.blogspot.com>

Y.L Franky Samparante,

Direktur Yayasan PUSAKA di Jakarta, Indonesia

Septer Manufandu,

Direktur JERAT Papua di Jayapura, Papua

Macx Binur,

Direktur Belantara Papua di Sorong, Papua Barat

Pastor Felix Amias MSC,

Direktur SKP-Keuskupan Agung Merauke, Papua

Daniel Yarawobi,

Kepala Suku Besar Yerisiam Gua di Nabire, Papua

Charles Tawaru,

Koordinator Greenpeace Wilayah Papua di Sorong, Papua Barat

**JIKA MESIN DI UNI EROPA HIDUP,
MAKA ORANG ASLI PAPUA YANG AKAN MATI...!!
Kebutuhan Biofuel Uni Eropa Menghancurkan Hidup Kami Di Tanah
Papua**



Pada bulan November 2016, komisi Uni Eropa (UE) telah menerbitkan sebuah proposal tentang kebijakan biofuel untuk jangka waktu tahun 2021 sampai tahun 2030 dan selanjutnya. Bahkan dalam waktu beberapa bulan yang akan datang atau tepatnya pada tahun 2017, Parlemen UE, Council UE dan ke-28 negara anggotanya akan membahas dan memutuskan kebijakan biofuel.

Dalam proposal Komisi UE, target adalah mengurangi kuota biofuel berbasis pangan (minyak nabati) dari 7% tahun 2020 sampai ke 3,8% tahun 2030. Karena kuota biofuel yang aktual dan realistik di pasar masa kini adalah 4,9%, reduksi yang diusulkan oleh UE sangat minimal. Namun hal ini tentu tetap saja berdampak buruk pada masyarakat adat di Asia Tenggara, termasuk Orang Asli Papua di provinsi Papua dan Papua Barat (Indonesia), bahwa mereka akan kehilangan hak milik atas tanah dan hutan warisan leluhurnya.

Kami tetap berpendapat bahwa kebijakan biofuel Uni Eropa akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, iklim dan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan. Kebijakan tersebut tergantung dari impor bahan dasar, terutama minyak sawit. Jutaan hektar perkebunan industrial dibutuhkan untuk produksi biofuel saja. Sejak 10 tahun terakhir, Orang Asli Papua di Indonesia masih terus kehilangan tanah dan hutan yang dikapling oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit atas izin dari pemerintah Indonesia. Kebutuhan minyak sawit telah berdampak pada ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran di Tanah Papua dan telah menyebabkan Orang Asli Papua hidup dalam ketidakpastian hak atas tanah dan hutan warisan leluhurnya. Banyak masalah yang dialami oleh masyarakat sebagai dampak dari kehadiran perusahaan kelapa sawit sudah terjadi. (lihat ATLAS SAWIT Papua-2015)

Dampak buruk dari bisnis minyak sawit ini terhadap Orang Asli Papua pun beragam, mulai dari perampasan lahan, perusakan hutan dan lingkungan, pelanggaran HAM, perubahan sumber pendapatan ekonomi masyarakat adat dari peramu hasil hutan alam menjadi

buruh sawit, hingga merubah pola hidup dan akses pangan dari produktif menjadi konsumtif. Singkatnya, ekspansi perkebunan sawit sebagai konsekuensi dari tingginya

permintaan pasar minyak sawit di UE telah merampas ruang hidup dan merubah pola hidup masyarakat adat – memiskinkan orang asli di Tanah Papua.

Kami yakin bahwa jumlah minyak sawit yang dibutuhkan untuk produksi biofuel di UE sangat besar. Misalnya, dalam tahun 2015, sebanyak 3,35 juta ton minyak sawit, dibutuhkan sebagai bahan baku pilihan yang paling murah. Murahanya minyak sawit justru akan terus meningkatkan jumlah kebutuhan minyak sawit pada tahun-tahun yang akan datang. Itu berarti, kebutuhan luasan tanah dan hutan yang akan digusur untuk ditanami kelapa sawit juga semakin tinggi. Bahkan koperasi multinasional minyak tanah seperti Eni Oil (Italy), Total

Oil (France) dan Neste Oil (Finland) telah atau akan membangun rafineri raksasa untuk biofuel jenis baru yang namanya Hydrotreated Vegetable Oils (HVO). Bahan dasarnya HVO adalah minyak sawit. Adakah lahan yang cukup tersedia di wilayah negara-negara anggota UE untuk kebutuhan minyak sawit? Atau justru UE membuat kebijakan kebutuhan biofuel untuk menghancurkan kehidupan masyarakat adat di Indonesia, terutama Orang Asli di Tanah Papua? Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa kebijakan

biofuel UE sangat tidak manusiawi dan tidak adil untuk lingkungan hidup, iklim dan masyarakat adat di Indonesia, terutama Orang Asli Papua.

Oleh karena itu, kami organisasi masyarakat sipil bersama komunitas masyarakat adat di Tanah Papua mendesak Uni Eropa untuk menghapuskan kebijakan biofuel saat ini. Uni Eropa harus meninggalkan kewajiban campuran biofuel dengan diesel/solar, dan membatalkan dukungan pedanaan sebanyak miliaran Euro per tahun untuk produksi biofuel melalui subsidi publik, rilis pajak dll. Karena kebijakan UE hanya untuk menghidupkan mesin-mesin, dan tidak peduli dengan masyarakat adat yang kehilangan tanah dan hutannya. Jika biofuel dibutuhkan untuk menghidupkan mesin-mesin di UE, maka masyarakat adat di Tanah Papua yang akan mati karena tidak ada tanah dan hutan lagi untuk bertahan hidup.

Manokwari, Papua Barat, Indonesia 28 Desember 2016



Pietsau Amafnini,

Koordinator JASOIL Tanah Papua di Manokwari, Papua Barat Mobile: +6281344435008

Email: menawi2001@yahoo.com; <http://sancapapuaana.wordpress.com>;

<http://jasoilpapua.blogspot.com>

Y.L Franky Samparante,

Direktur Yayasan PUSAKA di Jakarta, Indonesia

Septer Manufandu,

Direktur JERAT Papua di Jayapura, Papua

Macx Binur,

Direktur Belantara Papua di Sorong, Papua Barat

Pastor Felix Amias MSC,

Direktur SKP-Keuskupan Agung Merauke, Papua

Daniel Yarawobi,

Kepala Suku Besar Yerisiam Gua di Nabire, Papua

Charles Tawaru,

Koordinator Greenpeace Wilayah Papua di Sorong, Papua Barat